



Vol. 4 No.1 Tahun. 2024

Model Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang

Nursalam^{1*}, Muhammad Aslam², Chaerani Salam³, Bun'yana Saleh⁴

¹Administrasi Negara Fisip Undana, ²Ilmu Komunikasi Fisip Undana, ^{3,4}Pemerhati Lingkungan

e-mail: *¹nursalamjeppu@yahoo.com

Article History

Received: 12 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Kata Kunci – Sampah, Partisipasi, Desain, Kebijakan, Pengelolaan.

Abstract – Waste as a public problem requires citizen participation in its management because their involvement is important to create a clean and healthy environment. The effectiveness of public participation in managing waste is also determined by the existence of an appropriate design so that the participation process runs well. Community Service (PPM) by the Fisip Undana independent PPM Team aims to provide advocacy regarding appropriate designs for public participation in waste management. It is hoped that this design can become a reference in increasing public participation in managing urban waste. The waste management participation structure model developed consists of the elements; objectives, context and problems, stakeholder involvement, resources, rules and structures, and evaluation elements. Based on the implementation of independent PPM, it is known that the public participation design in waste management is felt to be very effective and has become a guideline for increasing public participation in the process of reuse, reduce and recycle household waste. Based on the results of PPM activities, it is known that this design is very relevant for increasing public participation. An important aspect of the participatory design model is the need to pay attention to understanding the objectives and regulations related to waste management, what is meant by are the rules for management and decision-making processes involving the community. This independent PPM recommends the need for aspects of leadership, power management, and the use of appropriate evaluation measures in the waste management system so that public participation can be more effective.

Abstrak – Sampah sebagai masalah publik membutuhkan partisipasi warga negara dalam pengelolaannya karena keterlibatan mereka sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah ditentukan juga oleh adanya desain yang tepat agar proses partisipasi berlangsung dengan baik. Pengabdian pada masyarakat (PPM) oleh Tim PPM mandiri Fisip Undana bertujuan untuk memberikan advokasi tentang desain yang tepat bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Desain ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah perkotaan. Struktur desain partisipasi

pengelolaan sampah yang dikembangkan melalui PPM ini terdiri unsur-unsur; tujuan, konteks dan masalah, keterlibatan pemangku kepentingan, sumber daya, aturan dan struktur, serta unsur evaluasi. Berdasarkan pelaksanaan PPM Mandiri ini ketahu bahwa desain partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dirasakan efektif dan menjadi pedoman dalam peningkatan partisipasi masyarakat menjalankan proses reuse, reduce, recycle sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil kegiatan PPM, diketahui bahwa desain ini sangat relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Aspek penting dari model desain partisipasi adalah perlunya diperhatikan tentang pemahaman tujuan dan peraturan terkait dengan pengelolaan sampah. Aturan yang dimaksud adalah aturan proses pengelolaan dan pengambilan Keputusan yang melibatkan masyarakat. PPM Mandiri ini merekomendasikan perlunya aspek kepemimpinan, pengelolaan kekuasaan, dan penggunaan ukuran evaluasi yang tepat dalam sistem pengelolaan sampah agar partisipasi masyarakat dapat lebih efektif.

1. PENDAHULUAN

Sampah adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota karena berpengaruh terhadap lingkungan fisik perkotaan. Produksi sampah yang semakin hari semakin banyak dari kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan peningkatan timbulan sampah.

Masalah sampah memang merupakan masalah rumit dan penting yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah pada saat ini, sehingga diperlukan manajemen persampahan pemerintah kota secara holistik namun spesifik pada konteksnya. Persoalan tentang sampah perkotaan juga sejalan dengan pandangan yang menyatakan, salah satu masalah paling yang rumit dan mendesak yang terkait dengan isu terkini adalah sistem linear adalah pengelolaan sampah perkotaan¹. Sampah perkotaan sektor ini memerlukan perubahan yang sistemis, yang pada gilirannya memerlukan pendekatan konseptual yang mencakup berbagai perspektif dan disiplin ilmu.

Di kota Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur produksi sampah setiap hari adalah sebanyak 233 ton sedangkan yang tertangani baru 206 ton tiap hari sehingga terdapat 27 ton setiap hari yang masih belum tertangani. Berikut adalah gambaran tentang produksi sampah tahun 2020-2021 di kota Kupang menurut sumbernya.

Tabel 1. Produksi Sampah di Kota Kupang pada tahun 2020 dan 2021 (Ton/Hari)

No	Sumber Produksi Sampah	Tahun	
		2020	2021
1	Sampah Rumah Tangga	106,6	105,1
2	Sampah Perkantoran	16,0	17,5
3	Sampah Pasar	41,3	42,7
4	Sampah Pusat Perniagaan	22,1	24,1
5	Sampah Fasilitas Publik	15,5	16,4
6	Sampah Kawasan	8,7	8,8
7	Sampah lain-lain	4,5	4,4

Sumber: Dinas LingK.Hidup Dan kebersihan Kota Kupang, 2022

Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa produksi sampah semakin meningkat, dan ini merupakan indikasi merosotnya kualitas lingkungan karena pemandangan sampah bertebaran dan menimbulkan bau dan kondisi kurang nyaman bagi masyarakat. Banyak implikasi yang ditimbulkan oleh semakin menumpuknya sampah ini sehingga membutuhkan perhatian berbagai kalangan terutama warga masyarakat sebagai penghasil produksi sampah.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui partisipasi dalam penanganan sampah. Warga masyarakat diharapkan keikutsertaannya melalui siklus *reuse, reduce, recycle* (3R). Pendekatan pengelolaan sampah

3R memberikan pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah, yaitu sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R sampah dapat bernilai tambah².

Sebenarnya pendekatan 3 R telah didukung oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan sampah meliputi; pembatasan timbulan, daur ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan peran masyarakat dalam penanganan sampah adalah; (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka mereka dapat ikut serta dalam kegiatan pemilahan dan composting sampah organik dan daur ulang sampah anorganik, dilakukan sejak dari rumah. Keterlibatan mereka adalah mengurangi sampah yang akan diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat juga mencakup pertukaran informasi, penyelesaian konflik dalam rangka melengkapi rancangan dan perencanaan.

Pengamatan penulis terhadap partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan pengumpulan sampah ke tempat bank sampah Mutiara Timur masih rendah. Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa dalam sebulan jumlah sampah an organik (plastik dan kertas) yang terkumpul rata-rata 20 ton/bulan. Jika dibandingkan dengan produksi sampah yang tertangani sebanyak 6.180 ton adalah masih rendah. Jika diasumsikan bahwa ada 3 bank sampah yang beroperasi di kota kupang, maka sampah an organik yang dipilah dan dikumpulkan pada ketiga bank sampah ini pun juga masih rendah.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah perkotaan pelaksanaannya tidak semudah dalam mengucapkannya, yaitu diperlukan suatu pendekatan ilmiah untuk mewujudkan partisipasi tersebut, sehingga partisipasi tidak menjadi sarana mobilisasi. Perlu suatu desain partisipasi yang mampu mengarahkan agar partisipasi dapat berlangsung secara efektif, yaitu desain yang memiliki kapasitas membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pendapat dari ahli menyatakan bahwa desain yang ideal mencakup beberapa aspek, yaitu; (1) tujuan; (2) konteks dan masalah; (3) pemangku kepentingan; (4) sumber daya; (5) aturan dan struktur; (6) evaluasi³.

Berdasarkan analisis masalah tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, maka masalah desain partisipasi dapat dirasionalisasikan dengan penjelasan berikut.

Secara umum tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah agar timbulan sampah dapat dikurangi dan masyarakat memiliki lingkungan yang sehat dan bersih. Tujuan ini belum sepenuhnya tercapai dan masih banyak warga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya belum memahaminya. Selain berkaitan dengan tujuan, hal penting juga mempengaruhi partisipasi adalah konteks masalah persampahan di kota Kupang. Secara kontekstual permasalahan sampah yang dihadapi di kota Kupang sangat terkait dengan teknologi dalam pengelolaan sampah, teknologi masih bersifat sederhana terutama pada siklus daur ulang dan pemanfaatan Kembali. Selain itu adanya keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga yang secara langsung bertanggungjawab terhadap penanganan sampah.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain partisipasi adalah para pemangku kepentingan di bidang persampahan seperti; pemerhati lingkungan hidup, peneliti, dosen, pengelola bank sampah. Sampai saat ini pemikiran dan keterlibatan mereka belum sepenuhnya diakomodir oleh pengambil kebijakan. Khusus tentang pengelola Bank Sampah, masih sangat terbatas, di kota Kupang, hanya 3 bank sampah, yaitu, yaitu bank sampah Mapoli, bank sampah Mutiara Timur, dan bank sampah Ever Green.

Dilain pihak, para desainer proses partisipasi seharusnya juga dapat mengidentifikasi sumber daya diperlukan, namun dalam kenyataannya mereka kurang mampu menghubungkan antara desain partisipasi dan sumber daya yang diperlukan dalam proses partisipasi, sehingga rasio manfaat dari pada biaya kurang terlihat. Terkait dengan pengelolaan sampah terdapat biaya produksi yang dikeluarkan oleh organisasi dalam pengembangan dan penerapan proses partisipasi dan juga ada biaya partisipasi yang dikeluarkan warga sebagai bagian dari partisipasi mereka, contoh tentang pembiayaan ini dialami oleh pengelola melalui biaya operasional sedangkan warga mengeluarkan biaya melalui partisipasi mereka membayar iuran sampah

Desain partisipasi pengelolaan sampah juga sangat ditentukan oleh regulasi pengelolaan dan pengambilan keputusan yang akan menjadi jembatan antara proses partisipasi dan struktur organisasi. Bagi organisasi, aturan-aturan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari mandat hukum tentang peran dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan struktur yang ada. Aturan-aturan yang ada memperjelas kedudukan, tugas, dan fungsi dari para aktor dalam mendukung terwujudnya proses partisipasi. Interaksi para aktor dibentuk oleh struktur dan aturan tentang bagaimana mereka bekerja sama.

Seluruh proses partisipasi pengelolaan sampah diakhiri dengan kegiatan evaluasi yang merupakan penilaian terhadap pengelolaan sampah selama ini. Evaluasi yang baik adalah penilaian yang bersifat menyeluruh dari

pengelolaan sampah. Fakta empirik menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan sampah di kota kupang masih bersifat parsial, indikasinya adalah evaluasi hanya dilakukan pada tahap perencanaan saja, sedangkan pada bagian pelaksanaan seringkali evaluasi diabaikan.

Permasalahan penanganan sampah melalui partisipasi masyarakat seperti telah dikemukakan diatas, setidaknya dapat diatasi dengan pedoman rancangan partisipasi masyarakat dengan menggunakan unsur-unsur desain sebagaimana telah dijelaskan.

2. METODE PENGABDIAN

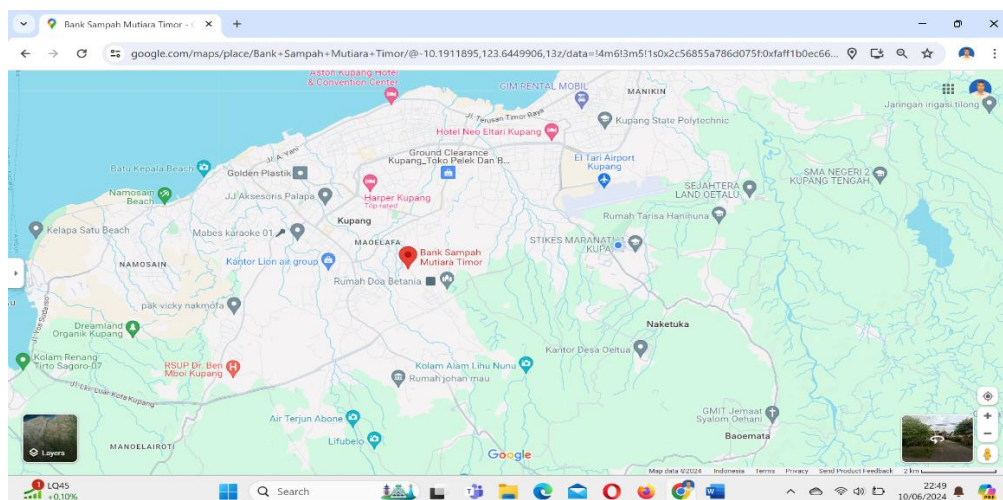
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara partisipatif, berjalan secara alamiah yang dirangkaikan dengan kegiatan penyetoran sampah oleh warga masyarakat yang menyetorkan sampahnya pada Bank Sampah. Selain itu kegiatan advokasi dan diskusi juga dilakukan secara aksidental oleh nara sumber yang sedang melakukan kegiatan penyetoran sampah, namun semua materi kegiatan ini telah dipersiapkan oleh nara sumber kegiatan PPM. Selengkapny tentang tahap pelaksanaan PPM adalah; (b) persiapan, pada tahap ini Tim melakukan koordinasi internal dengan para nara sumber, dan juga koordinasi dengan pengelola bank sampah Mutiara Timur mengenai jadwal kegiatan; (b) Melakukan advokasi tentang desain pengelolaan sampah kepada relawan pengumpul sampah dan pengelola bank sampah; (c) melakukan diskusi dengan pengelola dan relawan; (d) melakukan evaluasi terhadap teknik pemilahan dan pengumpulan sampah di tingkat TPS dan bank sampah; (e) melakukan simulasi mengenai desain pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Pada kegiatan ini Nara Sumber terdiri dari; tim PPM Mandiri Fisip Undana, dan ketua bank sampah Mutiara Timur. Tim PPM menyampaikan materinya tentang desain partisipasi dalam pengelolaan sampah sedangkan ketua bank sampah menyampaikan tentang pentingnya peran bank sampah dalam mengurangi timbulan sampah anorganik perkotaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat

PPM yang dilakukan oleh tim PPM Mandiri Fisip Undana dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2024 di Gudang Bank Sampah Mutiara Timur diikuti oleh 12 Peserta Yang terdiri dari warga masyarakat dikelurahan Oebufu (penyetor sampah), pekerja Bank Sampah Mutiara Timur. Nara sumber PPM adalah pengelola Bank sampah Mutiara Timur dan Tim PPM Mandiri Fisip Undana. Adapun kegiatan PPM meliputi; (1) advokasi tentang model desain partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah perkotaan; (2) diskusi dan sharing pendapat antara pengelola, warga masyarakat (relawan), dan Tim PPM Mandiri Fisip Undana.



Gambar 1. Citra Satelit Bank Sampah Mutiara Timur

2. Desain Partisipasi Pengelolaan sampah

Advokasi yang dilakukan oleh Tim PPM Mandiri Fisip Undana mengemukakan prinsip-prinsip desain kepada para peserta, sedangkan ketua bank sampah Mutiara Timur menyampaikan tentang petingnya peran *stakeholders* seperti bank sampah dalam mengurangi sampah anorganik dan memberikan manfaat ekonomi kepada warga masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengumpulan. Secara lengkap unsur desain yang disampaikan oleh para

nara sumber terdiri dari; (1) tujuan desain; (2) Konteks dan masalah; (3) pemangku kepentingan; (4) sumber daya; (5) aturan/struktur dan; (6) evaluasi. Secara rinci unsur-unsur ini digambarkan sebagai berikut;

a. Tujuan

Proses partisipasi berdasarkan konteks dan upaya mencapai hasil yang diinginkan, memerlukan kejelasan tujuan. Pertanyaan tentang tujuan partisipasi masyarakat, merupakan langkah yang sangat sering diabaikan dalam perencanaan program sehingga seringkali menimbulkan hasil yang tidak menguntungkan⁴. Pandangan lain tentang tujuan partisipasi dapat dicapai melalui satu proses, dan tujuan dapat berubah seiring dengan berjalannya proses partisipasi masyarakat⁵.

b. Konteks dan Masalah.

Desain partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah seharusnya sesuai dengan konteksnya, baik yang bersifat umum maupun yang spesifik, dan didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai masalah atau tantangan yang dihadapi. Menurut pandangan ini partisipasi masyarakat merupakan bagian dalam upaya tanggap darurat dalam menangani masalah sampah. Konteks umum mencakup aspek sosial, demografi, politik, teknologi, fisik, dan lingkungan organisasi, sedangkan konteks spesifik mengacu pada bagian-bagian lingkungan tugas organisasi yang secara langsung relevan dengan pencapaian tujuan organisasi, termasuk pemangku kepentingan utama, mandat yang berlaku, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya⁶. Literatur tentang pengambilan keputusan menekankan pentingnya memahami masalah atau tantangan yang dihadapi. Masalah yang salah tidak terpecahkan menimbulkan implikasi lebih jauh⁷.

c. Pemangku Kepentingan

Perhatian terhadap pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari upaya mendesain partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan yang tepat harus dilibatkan dengan cara yang tepat dalam proses partisipasi berdasarkan konteks, keseluruhan tugas, tujuan proyek, dan tujuan dari proses partisipasi⁸.

Pemangku kepentingan yang tepat dan bagaimana melibatkan mereka adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh perancang proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pelibatan sejumlah besar peserta dalam proses perencanaan dapat mendorong pertukaran perspektif di antara para peserta yang berbeda dan membantu mengumpulkan informasi dari semua peserta mengenai tujuan dan sasaran mereka dalam proses partisipasi⁹.

d. Sumber Daya

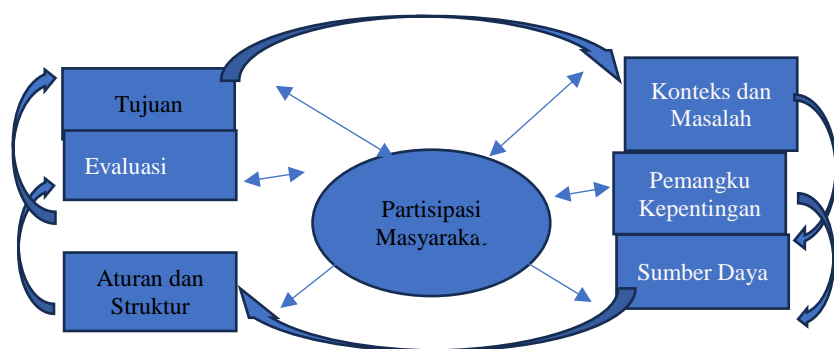
Sumber daya merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi, terutama organisasi publik. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber material sangat diperlukan dalam melayani kepentingan publik. Mengamankan sumber daya, merancang dan mengelola proses partisipasi dapat menghasilkan nilai tambah sehingga menghasilkan rasio manfaat-biaya bagi proses partisipasi¹⁰. Para desainer proses partisipasi seharusnya juga dapat mengidentifikasi sumber daya diperlukan, namun dalam kenyataannya mereka kurang mampu menghubungkan antara desain partisipasi dan sumber daya yang diperlukan dalam proses partisipasi, sehingga rasio manfaat dari pada biaya kurang terlihat.

e. Aturan dan Struktur

Adanya seperangkat aturan yang tepat dan struktur tim manajemen proyek dapat memandu pengambilan keputusan operasional, membantu keseluruhan pekerjaan yang harus dilakukan, dan menentukan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan serta dengan cara apa mereka dilibatkan¹¹.

f. Evaluasi

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ditujukan kepada sejauhmana timbulan sampah dapat diatasi pada Tingkat rumah tangga, oleh karena itu warga masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam siklus 3 R (*reuse, reduce, recycle*). Keterlibatan mereka perlu dievaluasi terus menerus. Tujuannya adalah mendapatkan umpan balik bagi pengembangan keterlibatan selanjutnya. Berdasarkan penjelasan narasumber kegiatan PPM, model desain yang yang ditawarkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2. Model Desain Partisipasi

Mengacu kepada model desain partisipasi di atas, nampak bahwa partisipasi saling berinteraksi dengan semua elemen desain, diawali penetapan tujuan dan berakhir dengan penilaian terhadap pencapaian tujuan. Model desain ini nampak sangat sederhana, namun partisipasi menjadi pusat dari seluruh elemen desain.

3. Diskusi Tentang Desain Partisipasi Masyarakat

Bagian terakhir dari kegiatan PPM Mandiri Fisip Undana dilakukan diskusi sebagai sharing antara nara sumber dan peserta. Diskusi menjadi menarik karena banyak pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh peserta yang terkait dengan desain partisipasi. pertanyaan dan masukan yang paling urgen dari mereka adalah mengenai tujuan partisipasi dan aturan-aturan yang mendorong peran masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan sampah.

Tanggapan yang diberikan oleh para nara sumber, umumnya menyatakan bahwa tujuan untuk berpartisipasi memang hal yang sangat penting untuk suatu kegiatan seperti mengelola sampah. Jika tujuan partisipasi belum jelas, maka tidak memungkinkan masyarakat terlibat secara maksimal dalam program yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan yang jelas terhadap program pengelolaan sampah akan menghasilkan; (a) dukungan terhadap Keputusan derivasi dan implementasinya; (b) meningkatkan pemahaman tentang masalah persampahan dan solusinya; (c) memajukan keadilan sosial; (d) menghasilkan kebijakan, rencana, dan proyek yang berkualitas dan (e) menciptakan dan mempertahankan kapasitas adaptif untuk pemecahan masalah berkelanjutan¹².

Sementara itu terkait dengan berbagai peraturan dalam pengelolaan sampah direspon oleh para nara sumber bahwa aturan sangat terkait dengan struktur organisasi pengelolaan sampah. Aturan-aturan dalam organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah telah ditetapkan dan sangat jelas peran dan tanggung jawab masing-masing aktor, aturan bersifat formal. Kerjasama di antara mereka dan interaksi aktor dibentuk oleh struktur¹³. Terkait dengan aturan pengelolaan sampah, menurut nara sumber bahwa, peraturan-peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah didasarkan kepada kebijakan tingkat nasional melalui Undang-Undang dan tingkat daerah kota Kupang melalui Perda dan Keputusan Walikota Kupang. Semua kebijakan yang dimaksud telah mengatur tupoksi lembaga pengelola sampah di kota Kupang



Gambar 2. Foto Kegiatan PPM Mandiri

4. SIMPULAN

Pendekatan pragmatis terhadap partisipasi tidak lagi memandang partisipasi sebagai kekuatan warga negara¹⁴, namun partisipasi adalah konsep umum yang mencakup berbagai bentuk pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat. Partisipasi dapat diatasi secara efektif jika tugas partisipasi dipikirkan dalam kaitannya dengan apa yang harus dicapai ketika diketahui adanya kebutuhan untuk melibatkan warga negara. Partisipasi mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dan hal yang berbeda bagi orang yang sama, tergantung pada isu, waktu, dan situasi politik di mana partisipasi tersebut terjadi. Mengatasi masalah partisipasi secara efektif, maka perlu dikonseptualisasikan dalam kaitannya dengan apa yang harus dicapai ketika diketahui adanya kebutuhan untuk melibatkan warga negara. Kondisi empirik menunjukkan bahwa keterlibatan warga masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat rendah. Rendahnya keterlibatan mereka karena desain partisipasi melalui berbagai kebijakan

saling tumpang tindih. Banyak aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, yaitu salah satunya adalah dengan perhatikan tujuan utama mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola sampah.

Tujuan partisipasi secara lebih sederhana adalah mencakup pertukaran informasi, penyelesaian konflik, dan untuk melengkapi desain dan perencanaan. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka lingkungan fisik yang lebih terawat, semangat masyarakat yang lebih besar, kepuasan pengguna yang lebih tinggi, dan perubahan finansial yang signifikan¹⁵.

Desain partisipasi merupakan rancangan struktur partisipasi masyarakat dalam pengelola sampah agar sampah dapat dikurangi. Desain yang dibentuk adalah melibatkan ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan praktik partisipasi masyarakat, sehingga dapat mengembangkan prinsip desain berorientasi pemecahan masalah¹⁶. Prinsip tersebut bersifat spesifik, umum, adaptif, dan responsif terhadap permasalahan. Model struktur partisipasi pengelolaan sampah yang dikembangkan terdiri unsur-unsur; tujuan, konteks dan masalah, keterlibatan pemangku kepentingan, sumber daya, aturan dan struktur, serta unsur evaluasi.

Merencanakan proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sangat penting karena karena adanya unsur yang saling terkait dan tumpang tindih dalam mencapai tujuan pengelolaan. Selain itu pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh konteks (kondisi sosial budaya), melibatkan pemangku kepentingan, dan memanfaatkan berbagai aktivitas, metode, alat, dan teknik.

5. SARAN

Mengacu kepada teori desain partisipasi maka dalam konteks pengelolaan sampah, disarankan agar aspek-aspek seperti; kepemimpinan, pengelolaan kekuasaan, dan penggunaan ukuran evaluasi yang tepat perlu dipertimbangkan agar dapat mendukung efektivitas partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengelola bank sampah Mutiara Timur, atas kesediaan memberikan informasi dalam kegiatan penyetoran sampah di lokasi bank sampah Mutiara Timur, selain itu juga disampaikan ucapan terima kasih kepada warga masyarakat (kebetulan menyetorkan sampahnya) dan bersedia menyisihkan waktu mendengarkan penjelasan dari nara sumber PPM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nabilah, A. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Program Bank Sampah Sekar Wangi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat (*Doctoral Dissertation*, Ipdn Jatinangor), 2021.
- [2] Aryenti. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiara Condong Bandung, *Jurnal Permukiman*, Vol. 6 No. 1 April 2011 : 40-46, 2011
- [3] Bryson, John M., Barbara C. Crosby, and Melissa Middleton Stone. *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from*, 2006
- [4] Thomsen, Mette K, and Niels Opstrup. Priming citizens to think about public participation initiatives: Does it impact their view of government? *Scandinavian Political Studies*, Vol 46, pp 23-51, 2023
- [5] Nederhand, Jose, and J.Edelenbos, Legitimate public participation: A Q methodology on the views of politicians, *Public Administration Review*. Vol 83, pp 522–536, 2022
- [6] Bunea, Adriana, and S. Lipcean, Understanding patterns of stakeholder participation in public commenting on bureaucratic policy making: Evidence from the European Union, *Regulation & Governance*, September, doi:10.1111/rego.12551, 2023
- [7] Wildavsky, Aaron. *Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis*. Boston: Little, Brown, 1979
- [8] Friend, John K, and Allen Hickling. *Planning under Pressure: The Strategic Choice Approach*. Oxford, UK: Heinemann, 2005
- [9] Schwoerer, Kayla, F. Keppeler, A. Mussagulova, and S. Puello, CO-DESIGN-ing a more context-based, pluralistic, and participatory future for public administration, *Public Administration*, Vol 100, Issue 1, pp. 72-97, 2022.
- [10] Islam, K.Maruful, Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Kim S. Mikkelsen, T. Rahman, and Ch. Schuster, Does citizen participation make public servants more satisfied with their jobs? It depends on whether they are Spectators or Participants, *Public Administration Development*. Vol 43, pp. 381–392, 2023

- [11] Bryson, John M. What to Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review* 6(1): 21–53, 2004.
- [12] Innes, Judith E., and David E. Booher. 2010. *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. New York: Routledge.
- [13] Jones, Candace, William S. Hesterly, and Stephen P. Borgatti. A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. *Academy of Management Review* 22(4): 911–45, 1997.
- [14] Arnstein, Sherry. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institution of Planners* 35(4): 216–24, 1969
- [15] Mayka, L. *Building participatory institutions in Latin America*. Cambridge University Press, 2019.
- [16] Simon, Herbert A. *Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.